

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2006). Standar hidup minimum yang harus dipenuhi meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan yang diterima. Kemiskinan mencakup aspek yang saling berkaitan seperti pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antara jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Suatu Negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan (Kuncoro, 2006).

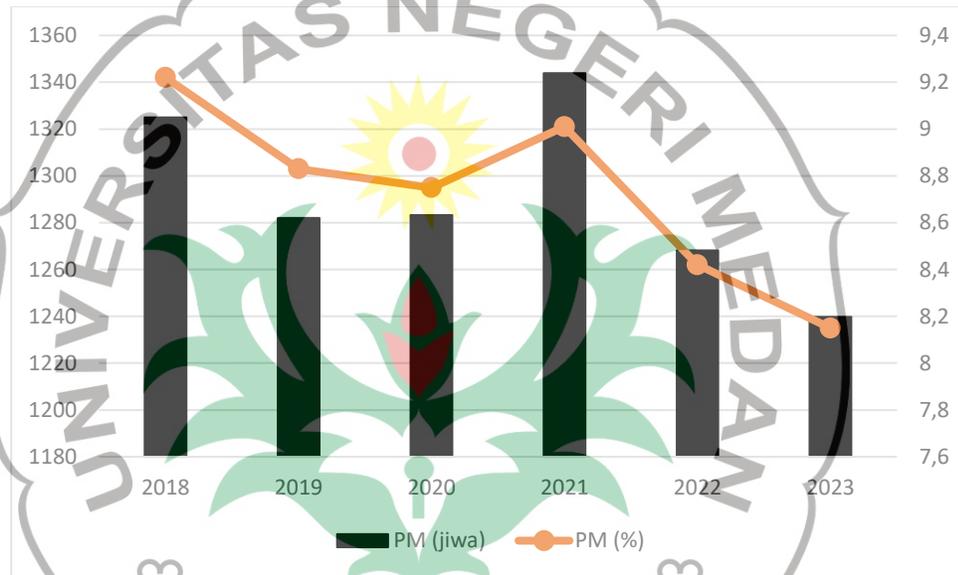
Indonesia melalui BPS mengadopsi definisi kemiskinan secara absolut yaitu dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (Siregar & Hariman, 2021).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan menjadi tantangan besar bagi sebuah negara karena dampak multidimensionalnya yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan dapat memperburuk kesejahteraan sosial baik itu melalui kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Kemiskinan juga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan sosial di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menciptakan perekonomian yang tinggi, kemiskinan menjadi tantangan yang kerap dihadapi oleh berbagai negara di dunia baik itu negara berkembang maupun negara maju termasuk Indonesia. Meskipun berhasil menurunkan kemiskinan lebih dari setengahnya sejak tahun 1999, Indonesia masih berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan angka kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 adalah sebanyak 26,16 jiwa. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Indonesia pada periode yang sama sebesar 9,54%. Namun, pada September 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi sebanyak 26,36 juta orang, atau meningkat sebesar 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Kemudian pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,90 juta orang atau sekitar 9,36%, dimana jumlah ini menurun sebesar 0,18% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi besar yang ada di Indonesia juga mengalami penurunan jumlah penduduk miskin selama 6 tahun terakhir.



**Gambar 1.1**

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dari tahun 2018-2023 secara keseluruhan mengalami penurunan meskipun di tahun 2021 sempat mengalami peningkatan. Di tahun 2018 persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebesar 9,22%. Lalu di tahun 2023 turun menjadi 8,15%. Tahun 2020 persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara sebesar 8,75% kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 9,01%. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang memperburuk perekonomian Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian tahun 2022 jumlah penduduk miskin mulai berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa. Berdasarkan keterangan dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara, penurunan jumlah penduduk miskin ini dikarenakan keberhasilan Pemprov Sumut dalam merespon anggaran yang ditujukan untuk program-program pengendalian inflasi yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan hingga 1% karena adanya kenaikan BBM. Program pengendalian inflasi ini dilakukan dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, bantuan sembako dan intervensi program di sektor rill berupa bantuan kepada petani, nelayan, UMKM. Penurunan angka kemiskinan ini terus berlanjut hingga tahun 2023.

Apabila dilihat berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di perkotaan Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin daerah perkotaan di Indonesia, akan tetapi sebaliknya persentase penduduk miskin di perdesaan Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia (Siregar & Hariman, 2021).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara memang mengalami penurunan, namun persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah nilai pengeluaran minimum yang

dikeluarkan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan agar tidak dikategorikan miskin.

Sebelumnya garis kemiskinan yang digunakan oleh Indonesia berdasarkan pada Paritas Daya Beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) yang diterbitkan pada tahun 2011. Namun, pada tahun 2022 Bank Dunia merubah ketentuannya mengenai perhitungan garis kemiskinan dengan menggunakan basis perhitungan baru berdasarkan PPP 2017.

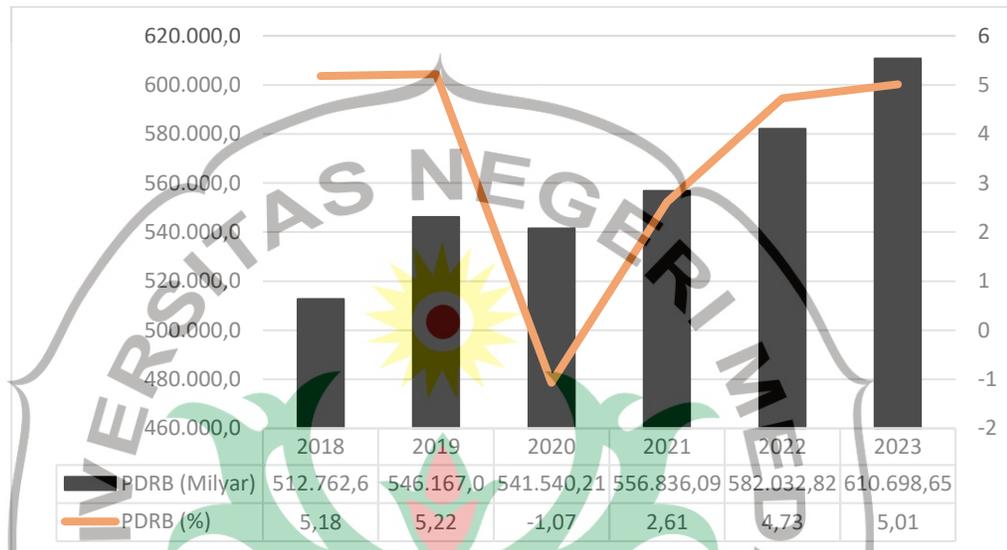
Dalam perhitungan baru, garis kemiskinan ekstrem yang sebelumnya ditetapkan adalah US\$ 1,90 per hari menjadi US\$ 2,15 per hari. Untuk batas kelas penghasilan menengah ke bawah yang sebelumnya adalah US\$ 3,20 per hari dinaikkan menjadi US\$ 3,65 per hari. Dan untuk batas kelas penghasilan menengah ke atas dari yang sebelumnya US\$ 5,50 per hari dinaikkan menjadi US\$ 6,85 per hari. Sehingga jika dihitung kembali, batas garis kemiskinan Indonesia pada tahun 2023 adalah Rp. 550.458,-/kapita/bulan. Sedangkan jika menggunakan perhitungan baru yang digunakan oleh Bank Dunia, maka batas garis kemiskinan adalah Rp. 948.150,-/kapita/bulan.

Adanya perubahan tersebut tentu memberikan dampak yang besar terhadap Indonesia. Jika menggunakan perhitungan baru, maka sebanyak 40% masyarakat Indonesia akan tergolong sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278 juta jiwa. Jika 40% tergolong miskin, maka jumlahnya sebanyak 111,2 juta orang. Begitu juga dengan

Sumatera Utara, jika menggunakan perhitungan yang baru maka jumlah penduduk miskin tentunya lebih tinggi jika dibandingkan dengan data sebelumnya. Belum lagi beberapa program pemerintah untuk mendukung percepatan penanganan kemiskinan nyatanya kurang tepat sasaran seperti bansos contohnya, yang justru bisa memicu masyarakat sulit keluar dari kemiskinan, sehingga target Indonesia untuk menciptakan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024 sepertinya akan sulit. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan masyarakat terhadap bansos dapat menyebabkan kurangnya kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, adanya kemungkinan ketika bansos yang diterima oleh masyarakat habis, maka angka kemiskinan bisa meningkat lagi.

Mengentaskan kemiskinan bukan hanya sekedar menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin saja karena kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu untuk menciptakan strategi yang lebih tepat sasaran lagi, maka perlu untuk memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

Salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS (2021) pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara tersebut pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan.



**Gambar 1.2**

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Pada tahun 2018, PDRB Sumatera Utara sebesar 512.762,6 milyar rupiah. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga menjadi 546.167,0 milyar rupiah atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 5,22%. Namun, di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu -1,07 dan jumlah PDRB turun menjadi 541.540,21 milyar rupiah. Hal terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Sumatera Utara. Meskipun sempat mengalami penurunan, di tahun-tahun selanjutnya PDRB Sumatera Utara menunjukkan laju pertumbuhan yang positif yang menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian yang sempat mengalami kontraksi. Jika dilihat secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukkan

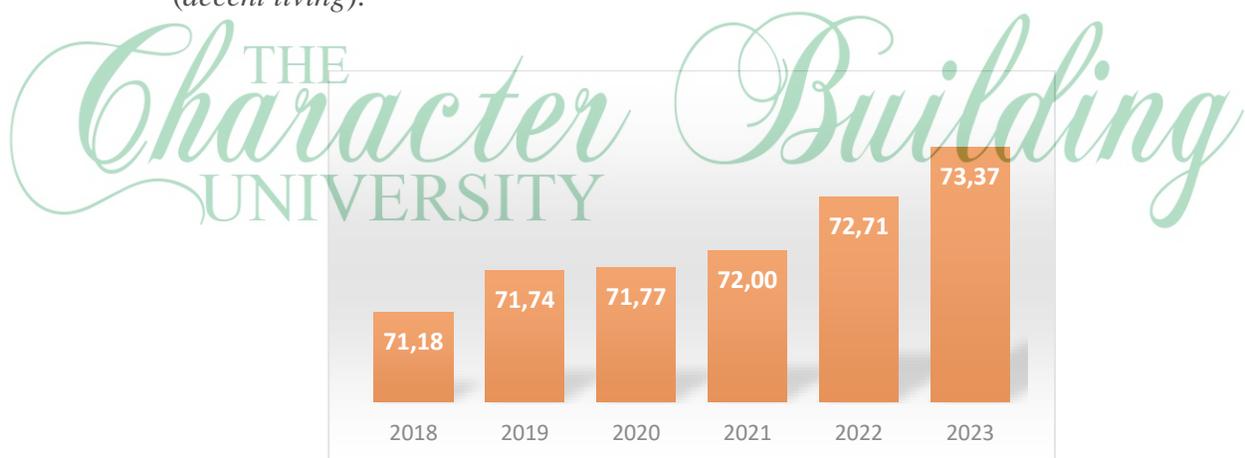
tren yang meningkat, dimana total PDRB yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 610,698,65 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 5,01%

Para ekonom klasik memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan nasional akan meningkat secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan produksi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan kemiskinan akhirnya ikut berkurang. Namun, dalam beberapa kondisi pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan nasional, tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama. Beberapa teori menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, sehingga kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat di kalangan masyarakat tertentu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyanto & Tusianti (2020) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Jawa Barat dan bertanda positif. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menurunkan angka kemiskinan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wangke (2021) yang menemukan bahwa PDRB yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Namun hasil penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alisha & Yulhendri (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2020) yang juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Mulyani (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan yang dianggap sangat mendasar. Ketiga bidang tersebut yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).



**Gambar 1.3**

IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Pada tahun 2018, IPM Sumatera Utara sebesar 71,18. Selanjutnya di tahun 2019 IPM Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,56 poin atau tumbuh sebesar 0,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IPM tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin atau tumbuh sebesar 0,04 %. Pertumbuhan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun selanjutnya 2021, IPM Sumatera Utara mencapai angka 72,00 atau meningkat sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya.

Meskipun selama beberapa tahun terakhir IPM Sumatera Utara menunjukkan tren yang meningkat, angka ini masih berada di bawah rata-rata IPM nasional yaitu sebesar 72,29 pada tahun 2021. Namun, tahun 2022 dan 2023, IPM Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 IPM Sumatera Utara sebesar 72,71 atau tumbuh sebesar 0,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2023, IPM Sumatera Utara tumbuh sebesar 0,83% atau menjadi sebesar 73,37.

Salah satu konsep utama dari teori pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Amartya Sen adalah kapabilitas yang merujuk pada kebebasan dan kemampuan individu untuk menjalani hidup yang mereka hargai. Dan elemen kunci dalam meningkatkan pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM adalah pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak. Jika individu tersebut kesulitan atau terhambat dalam mengakses ketiga elemen kunci tersebut, maka

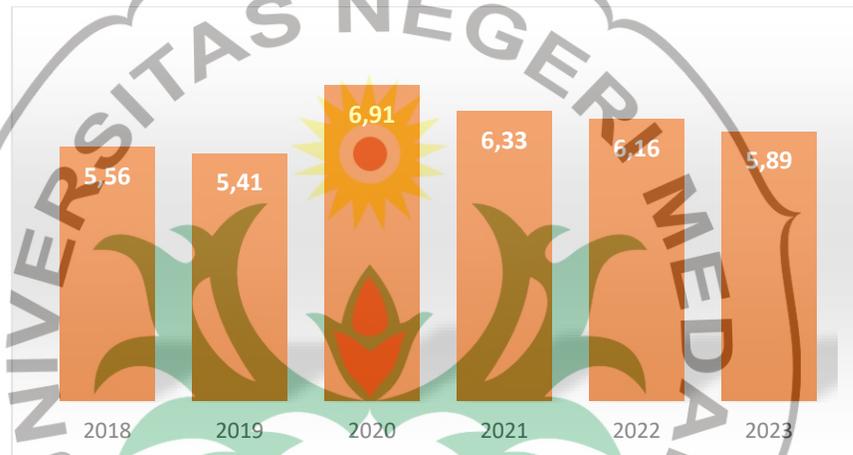
kualitasnya sebagai sumber daya manusia juga akan berkurang. Akibatnya akan sulit untuk mencari pekerjaan sehingga kemiskinan pun akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Nasruddin (2022) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Azriyansyah (2022) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi & Puspitasari (2020) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wididarma & Jember (2021) yang juga menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Menurut Sukirno (1994) pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan menurut BPS (2019) pengangguran terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



**Gambar 1.4**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Dari tahun 2018 sampai 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara turun sebesar 0,15 poin dari yang sebelumnya 5,56% turun menjadi 5,41%. Kemudian di tahun 2020 TPT Sumatera Utara mencapai angka sebesar 6,91% atau meningkat sebesar 1,52 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat banyak pekerja harus kehilangan pekerjaannya. Namun, dari tahun 2021 sampai 2023 TPT Sumatera Utara secara berturut-turut mulai menunjukkan tren yang menurun hingga pada tahun 2023, TPT Sumatera Utara sebesar 5,89. Tetapi capaian angka ini masih lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2018

sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan TPT Sumatera Utara dari tahun 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan.

Dalam ekonomi kapitalisme modern masalah utama dalam ekonomi nasional adalah adanya pengangguran. Masalah ini muncul karena perekonomian tidak mencapai kondisi kesempatan kerja penuh sehingga ada sekelompok orang yang tidak dapat bekerja walaupun mereka sangat menginginkan pekerjaan tersebut. Kesempatan untuk bekerja tersebut hilang karena perusahaan, organisasi pemerintahan dan badan usaha lain sudah cukup mempekerjakan karyawan untuk menghasilkan produk barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan adanya sekelompok orang yang harus menerima kenyataan tidak dapat bekerja dalam sistem ekonomi tersebut. Pengangguran merupakan masalah yang menakutkan dalam suatu negara modern, jika pengangguran tinggi maka sumber daya manusia akan terbuang percuma yang berakibat menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Dalam situasi ini kondisi ekonomi akan menurun yang akan mengakibatkan beragam masalah dalam masyarakat dan kehidupan keluarga (Ridwan & Nawir, 2021).

Dalam teori makroekonomi, pengangguran juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi, karena pengangguran seringkali mencerminkan masalah ekonomi yang luas seperti resesi dan stagnasi ekonomi. Pengangguran yang tinggi artinya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga akhirnya jumlah penduduk miskin juga akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Asiyah (2022) yang melakukan penelitian di Jawa Timur dan menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2021) yang melakukan penelitian di Jawa Barat dan menemukan hasil yang serupa dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan.

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wangke (2021) yang melakukan penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi & Puspitasari (2020) yang melakukan penelitian di Provinsi Aceh dan menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Karena adanya perbedaan atau kesenjangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Penerapan Analisis Jalur (*Path Analysis*) dalam Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Walaupun mengalami penurunan selama 6 tahun terakhir, namun jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup banyak.
2. Jika dilihat berdasarkan tahun amatan penelitian, tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan.
3. Adanya perhitungan baru yang digunakan oleh Bank Dunia dalam mengukur garis kemiskinan akan membuat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara lebih banyak daripada sebelumnya.

## 1.3. Pembatas Masalah

Agar memberikan ruang lingkup yang jelas dan terarah terhadap fokus masalah penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Provinsi Sumatera Utara dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memperkecil ruang lingkup penelitian. Selain itu, lokasi penelitian juga memiliki permasalahan yang layak untuk diteliti.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 2 variabel eksogen yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM, serta 1 variabel intervening yaitu TPT.
3. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 6 tahun mulai dari tahun 2018 sampai 2023 untuk mengamati tren jangka

panjang dan menghindari fluktuasi jangka pendek yang mungkin tidak mencerminkan kondisi nyata.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara melalui pengangguran sebagai variabel intervening ?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara melalui pengangguran sebagai variabel intervening ?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara melalui pengangguran sebagai variabel intervening.
5. Untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara melalui pengangguran sebagai variabel intervening.

### 1.6. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian melakukan pengumpulan data dari 25 Kabupaten dan 8 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan teknik analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil dari analisis data nantinya akan

di interpretasikan untuk penarikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

### 1.7. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi manfaat bagi peneliti, institusi, dan objek penelitian yang dapat dilihat pada uraian berikut:

#### 1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui pembuktian secara empiris tentang penerapan analisis jalur (*Path Analysis*) dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Manfaat bagi institusi

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran baru di bidang ekonomi mengenai peran tingkat pengangguran sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan.

#### 3. Manfaat bagi objek penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan para pengambil kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan menerapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk lebih mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.